

**GERAKAN ANTI TUAN TANAH DI DESA SAMBIREJO,
KECAMATAN MANTINGAN, KABUPATEN NGAWI
(Studi Kasus Tentang Pemberontakan Petani di Desa Sambirejo,
Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi Tahun 1963-1965)**

Oleh :

Umi Rosyidah¹

Sariyatun, Isawati²

ABSTRACT

This research is aimed to determine: (1) the background of the anti-landlord movement in Sambirejo village, Mantingan district, Ngawi in the year of 1963-1965, (2) the anti-landlord in the Sambirejo village, Mantingan district, Ngawi in the year of 1963 - 1965, (3) the impact of the anti-landlord in the Sambirejo village, Mantingan district, Ngawi in the year of 1963 - 1965 in the political, economic and social. This research used the historical method or methods of history. Historical method is the process of critically examine and analyze records and relics of the past, then reconstructed based on the data obtained so as to produce historiography. The results of this study are : (1) factor of the background occurrence of anti landlords PKI is the desire to exist in politics, PKI sight to the Indonesian revolution, land reform implementation used by the PKI, the Indonesian farmers' front existence among farmers tenants, (2) anti-landlord began planting waged between the years 1963 to 1965 to cancel the Minister of Agrarian Affairs Decree No. SK. 10/Depag/1964. Action continued through 1965 and peak dispute erupted on May 1, 1965, (3) The impact of anti-landlord movement in political field is competition between political parties, political polarization, a reaction against. Economic impact of injuries that there were 7 members BTI injuries and 10 houses belonging to tenant who is also a member of BTI vandalized and burned, Pondok Modern Gontor does not get confiscated yet by the crops due to BPPL Ngawi. Impact in the social sector, namely the emergence of anti-communist stance and coalition occurs between Pondok Modern Gontor, Masyumi, as well as other Islamic organizations and PNI to counter actions by the BTI / PKI.

Keywords : *movement, land, peasants, rebellion.*

¹ Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP UNS.

² Dosen Pembimbing pada Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP UNS.

PENDAHULUAN

Berbagai tulisan mengenai tragedi berdarah tahun 1965 di Indonesia telah banyak ditulis sejarawan dalam maupun luar negeri. Nasihin berpendapat, "Penulisan sejarah terkait dengan peristiwa tersebut, seringkali berputar pada persoalan siapa yang bersalah atau siapa yang patut disalahkan. Unsur tersebut dapat menjadi penting, sekaligus tidak penting, tergantung dari mana sejarawan melihat peristiwa sejarah tersebut" (2006 : 1).

Munculnya permasalahan keagrariaan di Indonesia sepertinya telah menjadi dongeng yang diwariskan secara turun temurun. Meskipun jika dilihat potensi wilayah, negara ini menyimpan kekayaan agraria yang melimpah. Kondisi tersebut justru membawa prahara bagi para petani dan penduduk lokal (pribumi).

Sifat tanah sebagai ideologis tercermin sudah sejak dulu. Dalam kerangka ideologi inilah pemberontakan petani semenjak jaman kolonial hingga kini (konflik tanah versus penggusuran demi pembangunan) membentuk logika perlawanan tersendiri. Hanya bentuk-bentuk perlawanan, teknik pengorganisasian, dan cara-cara tokoh mengartikulasikan diri ke dalam gerakan itulah yang terus berubah dan berkombinasi. Ideologi itu sendiri dapat dikatakan belum bergeser pemaknaannya. Itu berarti hampir setiap tahun ada saja *onrust* atau *uproar* (kerusuhan), sifatnya lokal dan mudah ditindas, termasuk peristiwa paling spektakuler yakni pemberontakan petani Banten pada tahun 1888.

Gerakan aksi sepihak yang dilancarkan PKI/BTI telah mendorong terjadinya polarisasi di kalangan tuna wisma dan petani miskin. Buruh tani dan petani miskin pendukung PKI/BTI bersikap mendukung, sebaliknya mereka yang berafiliasi kepana PNI dan organisasi kemasyarakatan/politik Islam (NU, Muhammadiyah, Masyumi) menentang aksi sepihak. Polarisasi itu berkembang menjadi konflik terbuka tatkala PKI/BTI benar-benar melakukan aksi sepihak. Kedua belah pihak sebagai pengganti tuan tanah dan sebagian lagi berdiri sebagai pendukung atau pembelanya.

Selain kepentingan petani tak bertanah UUPA juga memberi prioritas kepada petani miskin atau penggarap sebagai prioritas penerima redistribusi tanah kelebihan atau tanah *absentee*. PKI sangat gigih memperjuangkan kepentingan kaum tuna tanah ini agar memperoleh tiap jengkal tanah yang akan di distribusikan. Namun PKI lupa bahwa petani miskin ini pada umumnya telah secara turun temurun menjalin hubungan dengan pemilik tanah, baik dalam bidang ekonomi, sosial, politik maupun budaya. Ikatan emosional yang selama beberapa generasi terjalin itu tidak mudah putus oleh PKI dalam waktu yang sangat singkat pada awal dasawarsa 1960-an. Itulah sebabnya banyak redistribusi tanah yang tidak sesuai dengan harapan karena tanah itu dengan mudah diambil kembali oleh tuan tanah. Kasus semacam ini banyak dijumpai di Jawa Tengah dan boleh jadi terjadi pula di beberapa daerah di Jawa Timur khususnya di daerah pesantren seperti Gontor.

Pecahnya gerakan aksi sepihak di atas tanah wakaf milik Pondok Gontor di Ngawi oleh buruh tani melawan petani kaya dan pengurus pondok meruapkan bukti paling tidak di beberapa daerah tertentu tentang rapuhnya ikatan primordial yang ada di masyarakat pedesaan selama ini. Selain itu fenomena tersebut juga membuktikan keberhasilan proyek ruralisasi politik yang dilaksanakana oleh partai politik pada awal dasawarsa 1960-an. Dengan kata lain, secara sosiologis partai politik telah berhasil membangun pilar organisasi dengan nuansa asosiasional untuk menekan ikatan emosional yang ada dalam masyarakat pedesaan dalam ikatan bapak-pengikut.

METODE PENELITIAN

Tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di wilayah Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi. Wilayah ini terletak di perbatasan antara Kabupaten Ngawi (Provinsi Jawa Timur) dengan Kabupaten Sragen (Provinsi Jawa Tengah) yang berada di bagian tepi barat Kabupaten Ngawi. Alasan pemilihan objek penelitian di atas karena

merupakan tempat terjadinya peristiwa pemberontakan petani yang tergabung dalam Barisan Tani Indonesia (BTI) yang merupakan anak organisasi dari Partai Komunis Indonesia (PKI). Untuk menunjang penelitian ini, maka peneliti juga membaca buku-buku referensi di Perpustakaan Pusat UNS Surakarta, Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UNS, Perpustakaan Program Pendidikan Sejarah UNS dan Kantor Yayasan Pemeliharaan dan Pelunasan Wakaf Pondok Modern Gontor (YPPWMG). Penelitian ini dilakukan dari bulan Juni 2012 sampai dengan April 2013 yaitu terhitung sejak penyusunan judul, penyusunan proposal, mengurus perijinan sampai pengumpulan data dan penulisan akhir.

Dalam penelitian ini menggunakan metode historis atau metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau, kemudian merekonstruksikan berdasarkan data yang diperoleh sehingga dapat menghasilkan historiografi. Metode sejarah mempunyai beberapa langkah, yaitu : (1) heuristik, yakni menghimpun jejak-jejak masa lampau, (2) kritik, yakni menyelidiki jejak-jejak masa lampau baik bentuk maupun isinya, (3) interpretasi, yakni menetapkan makna saling berhubungan dari fakta-fakta yang diperoleh, (4) historiografi, yakni menyampaikan sintesa yang diperoleh dalam bentuk tulisan maupun kisah. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, yaitu melalui arsip, buku-buku, majalah, internet, jurnal dan dokumen yang relevan dengan judul penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan wawancara. Teknik analisis data yang dipergunakan adalah teknik analisis historis yang mengutamakan ketajaman dan kepekaan dalam mengintepretasikan data sejarah menjadi fakta sejarah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

(1) Latar Belakang Terjadinya Gerakan Anti Tuan Tanah

Desa Sambirejo terletak di tepi jalan raya Surabaya-Solo pada kilometer 32 sebelah barat Kota Ngawi atau sekitar 3 kilometer dari kota kecamatan Mantingan yang terletak di perbatasan Jawa Timur-Jawa Tengah. Sambirejo terdiri dari 4 dusun yaitu Dadung, Sambirejo, Kajen dan Kedungmiri. Desa Sambirejo merupakan salah satu dari 11 desa dalam wilayah Kecamatan Mantingan. Tahun 1963 – 1965 situasi di Sambirejo tidak kondusif, disebabkan akibat adanya usaha Partai Komunis Indonesia (PKI)/Barisan Tani Indonesia (BTI) menggugat tanah wakaf milik Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern (YPPWPM) Gontor seluas 163,879 hektar. Usaha sepihak yang dilakukan oleh sebagian anggota PKI/BTI dilancarkan mulai musim tanam antara tahun 1963-1965 untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 10/Depag/1964. Aksi terus berlanjut sampai tahun 1965 dan puncak persengketaan meletus pada tanggal 1 Mei 1965 (Laporan Kejadian 1 Mei, 1965).

Tahun 1963 kasus pemogokan buruh di sektor pertanian menempati urutan pertama di Jawa Timur. Hal ini berkaitan dengan sistem pertanian bagi hasil dan aksi sepihak yang dilancarkan buruh tani yang berasal dari lingkungan PKI/BTI. Aksi pemogokan memuncak pada tahun 1963 bersamaan dengan memanasnya persengketaan Undang Undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) dan Undang Undang Pokok Agraria (UUPA).

Masyarakat pedesaan di Jawa Timur secara garis besar terdapat tiga faksi politik yang memiliki akar kekuatan, yaitu Partai Nasional Kebangsaan (PNI), Partai Nasional Keagamaan (NU) dan Partai Komunis (PKI). Masing-masing memiliki kelompok tuan tanah, petani kaya, petani sedang, petani miskin dan pegawai. Setelah program agraria PKI semakin radikal pada tahun 1960-an, kelas-kelas tuan tanah dan petani kaya mulai dikikis dari partai karena PKI bercirikan *proletariat*. Kelompok tuan tanah dan petani kaya diarahkan agar melepaskan tanah luas yang dimilikinya dengan berbagai cara, seperti

dijual atau dihibahkan. Jumlah kelompok tuan tanah dan petani kaya yang berafiliasi dengan PKI jumlahnya tidak seberapa besar dibandingkan dengan tuan tanah dan petani kaya yang berafiliasi dengan PNI dan NU (Kasdi, 2001).

Gerakan aksi sepihak menjadi semakin banyak karena partai-partai politik yang kuat memanfaatkan program *landreform* untuk merebut popularitas. Di pihak lain, tuan-tuan tanah menentang program tersebut. Ketegangan politik ini tidak disukai oleh aparat negara yang bertanggung jawab atas keamanan dan stabilitas politik, sehingga mereka tidak bisa tinggal diam hanya sebagai penonton. Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil (UUPBH) yang terbit lebih dulu daripada UUPA tidak mampu memperbaiki nasib para penyakap yang jumlahnya semakin bertambah dengan akumulasi penguasaan tanah (Tjondronegoro, 1999).

(2) Proses Gerakan Anti Tuan Tanah

Peristiwa 1 Mei di Dadung, Sambirejo merupakan salah satu dari beberapa peristiwa yang dilancarkan oleh petani pendukung PKI/BTI. Peristiwa di Dadung termasuk yang berskala besar bila dibandingkan dengan beberapa daerah lain, pihak-pihak yang terlibat, yaitu Pondok Modern Gontor, Partai Komunis Indonesia (PKI)/Barisan Tani Indonesia (BTI serta Pejabat Pemerintahan. Proses terjadinya gerakan anti tuan tanah di Desa Sambirejo, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi Tahun 1963-1965 dilancarkan mulai musim tanam antara tahun 1963-1965 untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 10/Depag/1964. Aksi terus berlanjut sampai tahun 1965 dan puncak persengketaan meletus pada 1 Mei 1965. Dengan keluarnya SK Menteri Agraria No. SK 10/Depag/1964 sudah memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf milik YPPWPM Gontor di Mantingan. Namun PKI/BTI tidak memperdulikan keputusan tentang status tanah ini karena PKI/BTI merasa tidak memilih Menteri Agraria. Melalui kekuasaan dan kesempatan yang diberikan oleh Bupati

Suhrman, BTI dengan segala cara berusaha untuk menggagalkan keputusan ini. Peristiwa di Dadung termasuk yang berskala besar bila dibandingkan dengan beberapa daerah lain, karena melibatkan Pondok Modern Gontor, Partai Komunis Indonesia-Barisan Tani Indonesia dan Pejabat di lingkup pemerintah. Akibatnya, pelanggaran semakin merajalela. Pihak YPPWPM Gontor merasa kewalahan serta menyatakan tidak mampu lagi menyelesaikan tindakan liar para penggarap. Bahkan di antara para penggarap ada yang secara terang-terangan mengatakan bersedia dihukum karena sudah mempunyai simpanan yang cukup. Abdullah Mustaqim Subroto Nadzir YPPWPM Gontor merencanakan aksi balas dendam terhadap para petani BTI, dengan mengumpulkan massa pemuda dari berbagai organisasi Islam di sekitar Ngawi. Pertemuan dengan petani BTI diselenggarakan oleh Catur Tunggal Mantingan di lapangan dusun Dadung pada tanggal 1 Mei 1965. Musyawah dimulai pada pukul 10.00 pagi dan berjalan dengan alot. Keadaan ini sudah diperkirakan oleh Abdullah Mustaqim Subroto, dengan tiupan peluit ratusan pemuda Islam bersenjatakan pentungan mulai menyerbu petani BTI. Ratusan pemuda berhamburan dari rumah loji menyerang petani BTI yang sedang bermusyawarah di lapangan Dadung. Petani BTI kaget dan melakukan perlawanan seadanya, sebagian lagi melarikan diri ke kampung magersari. Pemuda Islam segera mengejar petani dan membakar rumah milik petani di Magersari. Abdullah Mustaqim Subroto dan teman-temannya ditangkap oleh polisi dan dibawa ke Polres Ngawi.

(3) Dampak yang Ditimbulkan oleh Gerakan Anti Tuan Tanah

Gerakan Anti Tuan Tanah menimbulkan dampak dalam bidang politik, ekonomi dan Sosial. (1) Dampak dalam bidang politik yaitu partai Komunis Indonesia (PKI) dalam mencapai tujuan perjuangannya secara sistematis telah menanamkan ideologi kelas kepada kaum tidak bertanah dan petani miskin. Namun usaha tersebut kurang berhasil sehingga kelas *proletar* yang diinginkan tidak dapat terbentuk,

walaupun pada dasawarsa 1960-an jumlah anggota PKI meningkat secara drastis. Kegagalan penyebaran ideologi kelas menyebabkan kandasnya politik PKI untuk memisahkan dan membenturkan kelas proletar tidak bertanah dengan kelas tuan tanah, sebagai kelas yang akan saling bertentangan (*class conflict*). Akibatnya, revolusi agraria yang skenarionya telah disusun dan dicetuskan lewat pelaksanaan aksi sepihak juga berantakan. Golongan santri, baik yang tradisional maupun yang modernis terhimpun dalam organisasi Islam di bawah pimpinan kiai, haji, guru-guru agama dan tokoh-tokoh agama kharismatik lainnya sehingga hubungan antara pemimpin-pengikut, guru-murid dan kiai-santri sangat kuat. Kuatnya hubungan *patron-client* itu dibuktikan oleh jalinan kesetiaan sebagian buruh. Walau tidak pernah dirapatkan oleh panitia *landreform* tingkat desa, namun semuanya tetap berjalan dengan lancar. Dalam kasus di Desa Dadung, Sambirejo ini hubungan antara guru-murid atau kiai-santri antara Kiai Zakasyi dan K.H. Idham Chalid membuat ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi salah satu benteng Pondok Modern Gontor. (2) Dampak dalam bidang ekonomi yaitu terdapat korban luka sebanyak 7 orang anggota BTI luka-luka dan 10 rumah milik magersari yang juga merupakan anggota BTI dirusak dan dibakar, pihak Pondok Modern Gontor tetap tidak mendapatkan hasil panen karena disita oleh BPPL Ngawi, akibatnya pihak YPPWPM Gontor mengalami kesulitan untuk membayar gaji para mandor dan buruh. Setiap kali YPPWPM Gontor menanyakan masalah bagi hasil kepada pihak BPPPL Ngawi, selalu diulur tanpa alasan dan kepastian yang jelas tentang penahanan hasil tanah wakaf. Perlakuan ini dianggap tidak adil dan sewenang – wenang. Pihak BTI terus melakukan intimidasi terhadap Nadzir YPPWPM Gontor di Mantingan bahkan pada tanggal 24 Agustus 1965 sekitar pukul 19.00 Kantor Nadzir YPPWPM Gontor di Dadung dikepung oleh BTI. (3) Dampak dalam bidang sosial yaitu akibat terjadinya peristiwa 1 Mei 1965,

Pondok Modern Gontor mendapatkan sorotan yang luas. Banyak pihak yang meragukan jika peristiwa yang terjadi di Dadung tanpa sepengetahuan dari pihak YPPWPM Gontor di Ponorogo. Pada tanggal 20 Mei 1965 YPPWPM Gontor di Ponorogo mengeluarkan pernyataan resmi yang dikirim kepada Sad Tunggal Dati I Jawa Timur di Surabaya, Sad Tunggal Dati II Ngawi, Dan Rem A di Madiun serta Catur Tunggal Kecamatan Mantingan YPPWPM Gontor menegaskan beberapa hal, yaitu : (a) Peristiwa 1 Mei 1965 yang terjadi di Dadung, Sambirejo di luar tanggung jawab YPPWPM Gontor karena tanpa ada konsultasi terlebih dahulu, (b) YPPWPM Gontor di Ponorogo menghimbau kepada yang pemerintah agar dalam menyelesaikan peristiwa 1 Mei 1965 di Dadung melokalisasikan pengusutan agar tidak meresahkan seluruh warga Pondok Modern Gontor, (c) YPPWPM Gontor menyesalkan pemberitaan tentang peristiwa 1 Mei 1965 di Dadung, Sambirejo yang seolah – olah menyudutkan IKPM dan YPPWPM Gontor ikut terlibat. Pihak YPPWPM Gontor merasa khawatir dengan pemberitaan yang ditunggangi oleh unsur – unsur kontra revolusi. Hubungan *patron-client* masih cukup kuat di wilayah masyarakat pedesaan Jawa Timur. Sikap resiprositas dari pihak patron (pelindung), seperti kebaikan hati Anwar Shodiq kepada para penggarap sawahnya, maka kesetiaan *client* kepada *patron* tidak tergoyahkan. Usaha PKI memojokkan tuan tanah sebagai penghisab atau penindas kurang mendapat sambutan, bahkan oleh sebagian masyarakat Sambirejo tindakan aksi sepihak yang dilancarkan PKI/BTI terhadap tanah Anwar Shodiq yang diwakafkan kepada Yayasan Pemeliharaan dan Perluasan Wakaf Pondok Modern Gontor sebagai tindakan orang yang tidak tahu terima kasih. PKI/BTI dengan organisasi yang assosiasional dan modern ternyata tidak mampu memutus jaringan hubungan *patron-client* di Sambirejo maupun di tempat yang lain. Sampai akhir bulan September 1965 saat

meletusnya G 30 S/PKI suasana di dusun Dadung, Sambirejo masih membara.

KESIMPULAN DANN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : (1) Faktor yang melatar belakangi terjadinya gerakan anti tuan tanah yaitu adanya keinginan PKI untuk tetap eksis dalam bidang politik, pandangan PKI terhadap revolusi Indonesia, pelaksanaan *landreform* yang dimanfaatkan oleh PKI, adanya eksistensi Barisan Tani Indonesia di kalangan petani penggarap, (2) gerakan anti tuan tanah dilancarkan mulai musim tanam antara tahun 1963-1965 untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Agraria No. SK. 10/Depag/1964. Aksi terus berlanjut sampai tahun 1965 dan puncak persengketaan meletus pada 1 Mei 1965, (3) Gerakan Anti Tuan Tanah berdampak pada bidang politik, ekonomi dan sosial. Dampak di bidang politik yaitu terjadi persaingan diantara partai politik, polarisasi politik, adanya reaksi menentang. Dampak di bidang ekonomi yaitu terdapat korban luka sebanyak 7 orang anggota BTI luka-luka dan 10 rumah milik magersari yang juga merupakan anggota BTI dirusak dan dibakar, pihak Pondok Modern Gontor tetap tidak mendapatkan hasil panen karena disita oleh BPPL Ngawi. Dampak di bidang sosial yaitu munculnya sikap anti komunis serta terjadi koalisi antara Pondok Gontor, Masyumi, serta ormas islam yang lain dan PNI untuk melawan aksi yang dilakukan oleh BTI/PKI.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Maka penulis dapat memberikan beberapa saran, yaitu : Pertama, Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, dalam era keterbukaan ini, penulis banyak mengalami hambatan dalam melakukan penelitian ini. Karena banyak data yang tidak dipublikasikan oleh instansi pemerintah. Oleh karena itu dalam

era demokrasi ini harusnya instansi pemerintah harus lebih terbuka dalam mempublikasikan data-data sejarah. Kedua, Untuk Masyarakat Petani, belajar dari pengalaman masyarakat petani terdahulu, mayoritas masyarakat petani merupakan anggota partai politik dan organisasi massa tertentu. Diantara partai politik dan organisasi massa yang ada sering terjadi konflik yang mengikutsertakan petani. Untuk itu agar tidak terseret ke dalam konflik, maka petani harus lebih selektif dalam memilih partai atau organisasi massa. Ketiga, Untuk Peneliti Lain, penelitian memerlukan waktu yang lama karena sulit untuk mencari sumber primer dan sekunder mengenai BTI dan PKI. Sumber primer sulit dicari karena banyak yang hilang serta tidak dipublikasikan. Sedangkan untuk sumber sekunder, karena penulisan permasalahan yang berkaitan dengan komunisme diawasi secara ketat oleh pemerintah, sehingga sedikit sekali buku tentang komunisme yang dapat terbit.. Sehingga untuk mencari data yang berkaitan dengan BTI/PKI yang berwujud tulisan bisa dilakukan dengan membeli atau meminjam buku terbitan terbaru yang banyak bermunculan pada akhir-akhir ini. Untuk data yang berupa dokumen bisa dilakukan dengan menghubungi instansi pemerintah yang menyimpan arsip komunisme. Karena masih banyak sumber yang masih belum terbuka, maka masih membuka kemungkinan bagi peneliti lain untuk mengadakan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulgani, R. (1977). *Sosialisme Indonesia*. Jakarta : Yayasan Prapanca.
- Abdurrahman, D. (1998). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu.
- Achdian. (2000). *Penguasaan Dan Pendistribusian Lahan Oleh Rakyat*. Diperoleh 12 Februari 2012, dari <https://pipl.com/directory/name/Achdian/Andi/>
- Adas, M. (1988). *Ratu Adil : Tokoh dan Gerakan Milenarian Menentang Kolonialisme Eropa*. Jakarta : CV. Rajawali.

- Antara. (1965, 2 Oktober). Perkebunan-perkebunan Imperialis juga sudah Diambil Alih Buruh jangan Diswastakan, *Suara Merdeka*, hlm –
- Angkatan Bersenjata*. (1966, 1 April). Pembina Pegang Peranan CC PKI Rentjanakan & Pimpin Coup, hlm-.
- Bahari, S. (2012, 26 September). Konstitusi dan Politik Agraria, *Kompas*, hlm. 7.
- Budiardjo, M. (1982). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Burke, P. (2003). *Sejarah dan Teori Sosial*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Cribb, R. (2003). *The Indonesian Killing : Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*. Yogyakarta : Mata Bangsa.
- Chen, Q. (2012). *Climate Shocks, State Capacity and Peasant Uprising in North China During 25-1911 CE*. Makalah disajikan pada seminar Chinese Economics Conference and China Institutional Economics Conference, Shandong University, Jinan, 2012.
- Depdikbud. (1990). Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta : Balai Pustaka.
- Duveger, M. (1993). *Sosiologi Politik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Fauzi, N. (1999). *Petani dan Penguasa*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gazalba, S. (1981). *Pengantar Sejarah sebagai Ilmu*. Jakarta : Bharata Karya Aksara.
- Goldberg, E. (1992). Peasant in Revolt-Egypt 1919. *International Journal of Middle East Studies*, 24 (2). 261-280.
- Gottshalk, L. (1975). *Mengerti Sejarah*. Jakarta : UI Press.
- Gottshalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah*. Jakarta : Universitas Indonesia Pers.
- Harsono, B. (2002). *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta : Djambatan.
- Hill, R. (1998). *Gerakan Massa*. Jakarta : Laper.

- Hoffer, E. (1988). *Gerakan Massa*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Kartodirdjo, S. (1973). *Protes Movement In Rural Java*. Kuala Lumpur : Oxford University Press.
- Kartodirdjo, S. (1977). *SNI Jilid IV*. Jakarta : Depdikbud.
- Kartodirdjo, S. (1984). *Ratu Adil*. Jakarta : Sinar Harapan.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kartono, K. (1976). *Pengantar Metodologi Research*. Bandung : Alumni.
- Kartono, K. (1983). *Pendidikan Politik*. Bandung : Mandai Maju.